

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH KONFLIK SURIAH TERHADAP PERJUANGAN
DAERAH OTONOM KURDI-ROJAVA MENGGUNAKAN *METHOD OF
HISTORICAL STRUCTURE* (MHS)**

Disusun dan diajukan oleh

MOHAMMAD NUR FIQRI

E 131 15 512



DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS PENGARUH KONFLIK SURIAH TERHADAP
PERJUANGAN DAERAH OTONOM KURDI-ROJAVA
MENGUNAKAN *METHOD OF HISTORICAL STRUCTURE*
(MHS)

N A M A : MOHAMMAD NUR FIQRI

N I M : E13115512

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 7 Juli 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,



Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,



Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si
NIP. 196304241991031002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS PENGARUH KONFLIK SURIAH TERHADAP
PERJUANGAN DAERAH OTONOM KURDI-ROJAVA
MENGUNAKAN *METHOD OF HISTORICAL STRUCTURE*
(MHS)

NAMA : MOHAMMAD NUR FIQRI

NIM : E13115512

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 5 Juli 2021.

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Abdul Razaq. Z Cangara, S.IP, M.Si, MIRAP

Anggota : 1. Muh Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si



.....
.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Nur Fiqri
NIM : E 131 15 512
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul :

ANALISIS PENGARUH KONFLIK SURIAH TERHADAP PERJUANGAN DAERAH OTONOM KURDI-ROJAVA MENGGUNAKAN *METHOD OF HISTORICAL STRUCTURE* (MHS)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa skripsi/tesis/disertasi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi/tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Juli 2021

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
1021CAJX283355277

(Mohammad Nur Fiqri)

KATA PENGANTAR

Kepada umi dan abi untuk doa dan kepercayaan yang tak pernah mengenal kata menyerah, skripsi ini ditujukan untukmu berdua. Untuk Aul, terima kasih telah ikut ke dalam huru-hara semua ini, semoga bahagia selalu, keberkahan mendatangimu dari segala arah. Untuk mesin bernyawa bernama Unabomber yang akrab dipanggil Una, tetap kuat menemaniku menebas jalanan nah, tanpamu jalanan terasa benar-benar sunyi! Terima kasih atas setiap kawan yang tak pernah lelah hadir sebagai pengingat atas kesehatan maupun kewajiban akademik penulis, semoga setiap bantuan dan kebaikan suatu saat terbalaskan oleh. Akhir kata, penulis berharap bahwa kehadiran karya tulis ini dapat manfaat sebesar-besarnya kepada perkembangan ide-ide berbahaya. Amin!

“There’s nothing more dangerous than someone who wants to make the world a better place” -Banksy

ABSTRAK

Mohammad Nur Fiqri, E131 15 512, dengan judul skripsi “Analisis Pengaruh Konflik Suriah Terhadap Perjuangan Daerah Otonom Kurdi-Rojava menggunakan *Method of Historical Structure* (MHS)” di bawah bimbingan **Agussalim**, selaku Pembimbing I dan **Munjin Syafik Asy’ari**, selaku Pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh konflik Suriah terhadap perjuangan daerah otonom Rojava. Penelitian ini menguraikan tiga dimensi pengaruh konflik Suriah, yakni dimensi ideologi politik (*ideas*), dimensi kapasitas material (*material capabilities*) dan dimensi institusi (*institutions*) yang dapat diartikan sebagai sarana hegemoni. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Data diperoleh dari melalui telaah pustaka dan studi literatur berupa buku, jurnal, dokumen, dan berbagai sumber lainnya. Data dianalisis secara kualitatif, adapun data kuantitatif digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan daerah otonom Kurdi-Rojava dipengaruhi oleh konflik Suriah melalui tiga dimensi melalui ideologi politik, kapasitas material, dan institusi. Kontestasi ideologi politik yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan daerah otonom Rojava antara lain, Nasionalisme Arab (Pan-Arabisme) melalui program *Arab Belt* Rezim Baath dan negara regional Arab melalui SNC (*Syrian National Coalition*), Etno-nasionalisme Kurdi, dan Salafi Jihadisme. Dimensi material yang berpengaruh terhadap pembentukan Rojava adalah ketimpangan akses sumber daya alam terhadap wilayah komunitas Kurdi-Suriah dan kapasitas organisasional serta militer PYD (*Democratic Union Party*) sebagai kekuatan utama pengorganisasian Kurdi-Suriah di wilayah utara Suriah. Terakhir, dimensi institusi sebagai sebuah sarana hegemoni rezim diberlakukan melalui proses Arabisasi yang dipraktikkan melalui kekerasan kultural dan Rojava hadir di tengah krisis organik konflik sebagai sebuah kekuatan kontra-hegemoni.

Kata Kunci: Konflik Suriah, Kurdi-Suriah, Rojava, Nasionalisme Arab, PYD.

ABSTRACT

Mohammad Nur Fiqri, E131 15 512, with the title of thesis “Analysis of the Syrian Conflict’s Impact towards the Struggle of Autonomous Kurdish Region Rojava using Method of Historical Structure (MHS)” under the guidance of Agussalim, as the first supervisor and Munjin Syafik Asy’ari, as the second supervisor, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Makassar.

This research aims to explain the impact of Syrian conflict towards the establishment of Rojava. This research examines three dimensions of power in Syrian conflict, i.e., the dimension of political ideology, the dimension of material capability and the dimension of institutions which can be identified as means of hegemony. This research method is explanatory method. Data obtained through literature review and literature studies in the form of books, journals, documents, and various other sources. Data were analyzed qualitatively, while quantitative data were used as a support to clarify qualitative analysis.

The result of this research indicates that the struggle of autonomous Kurdish region Rojava is affected by three dimensions of power which are political ideology, material capability and institutions. The contestation of political ideology that affects the establishment of Rojava involved Arab Nationalism (Pan-Arabism) through Arab Belt Program of Baath Regime and Arab regional states by SNC (Syrian National Coalition), Kurdish Ethnic Nationalism, and Salafi-Jihadism. The material dimension that affects the establishment of Rojava is inequality of access to natural resources of the Syrian-Kurds region and the military along with organizational capacity of PYD (Democratic Union Party) as the main basis of Syria-Kurds in the northern Syria. Lastly, the dimension of institutions as the means of hegemony conducted through Arabization process by cultural violence practices and Rojava existed as counter-hegemony power in the middle of conflict’s organic crisis.

Keywords: Syrian Conflict, Syrian Kurds, Rojava, Arab Nationalism, PYD.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Teori Kritis dan <i>Method of Historical Structure</i>	18
B. Analisis Konflik dan Tipologi Kekerasan	28
C. Penelitian-Penelitian Terdahulu	35
BAB III GAMBARAN UMUM	41
A. Sejarah Kurdi Suriah dan Rojava	41
B. Konflik Suriah: Aktor dan Ideologi	56
BAB IV PEMBAHASAN	71
A. Dimensi <i>Ideas</i> (ideologi politik) di Konflik Suriah	71
B. Dimensi <i>Material Capability</i> (Kapasitas Material) di Konflik Suriah	83
C. Dimensi <i>Institution</i> Rezim dan Kontra-Hegemoni Rojava	92
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Bagan operasionalisasi konsep

Gambar. 2 Struktur dimensi kekuatan dalam *Method of Historical Structure*

Gambar. 3 Daftar partai Kurdi Suriah dan afiliasinya

Gambar. 4 Peta wilayah tiga kanton Rojava: Afrin, Kobane dan Jazire

Gambar. 5 Sistem komune (struktur demokrasi radikal—MGRK) di Rojava

Gambar. 6 Diagram Perekrutan PKK 1975-2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan suku Kurdi kerap kali menjadi bagian dari konflik di kawasan Timur Tengah. Suku Kurdi merupakan nama dari sebuah kesatuan etnik yang walau berada di Timur Tengah, suku ini tidak termasuk dalam jajaran etnik Arab dikarenakan perbedaan bahasa, kultur, dan sejarah. Kurdistan atau “tanah orang-orang Kurdi” membentang dari wilayah pegunungan Zagros hingga Taurus, membentang ke selatan hingga daratan Mesopotamia dan ke utara hingga stepa dan dataran tinggi Anatolia (Yildiz, 2005, p. 6).

Karakter geografis Kurdistan yang terdiri dari gugusan perbukitan, struktur sosial yang sarat sentimen tribalisme, serta sistem mata pencarian yang bertopang pada pertanian dan menggembala, menjadikan bangsa dan wilayah Kurdistan semi-eksklusif sepanjang sejarahnya selama sekitar 3000 tahun (Sahide, 2013, p. 140). Faktor geografi ini membuat tidak ada satu bangsa atau kekuatan yang mampu menguasai secara penuh bangsa dan wilayah Kurdi. Dari babak penaklukan imperium seperti Yunani, Romawi, Persia, dan Dinasti berbasis Islam hingga era sistem modern negara-bangsa seperti Turki, Iran, Irak, dan Suriah gagal menguasai secara penuh wilayah Kurdistan. Namun secara geopolitik, karakter geografis ini mengantarkan suku Kurdi ke dalam situasi konflikual. Pasca wilayah Kurdistan terbagi-bagi ke dalam beberapa wilayah negara-bangsa, dimulailah perjuangan atas sebuah wilayah otonom oleh orang-orang Kurdi.

Titik awal dalam sejarah orang-orang Kurdi bermula di tahun 1916. Perjanjian Sykes-Picot membuka peluang baru bagi orang-orang Kurdi untuk mendefinisikan ulang perbatasan nasional mereka melalui panggung politik Sekutu merespon melemahnya pasukan Ottoman. Presiden AS kala itu, Woodrow Wilson, mendeklarasikan Empat Belas Poin Perdamaian untuk mengakhiri perang. Wilson dalam deklarasi tersebut menegaskan prinsip penentuan nasib sendiri pada poin ke dua belas;

XII. The Turkish portions of the present Ottoman Empire should be assured a secure sovereignty, but the other nationalities which are now under Turkish rule should be assured an undoubted security of life and an absolutely unmolested opportunity of an autonomous development, and the Dardanelles should be permanently opened as a free passage to the ships and commerce of all nations under international guarantees (Yildiz, 2005, p. 13).

Respon Amerika Serikat yang tercermin dari deklarasi Wilson untuk mendukung visi nasional negara-negara yang berada di wilayah konflik, dilihat sebagai ancaman atas kepentingan politik luar negeri sekutu dalam hal ini Inggris dan Perancis yang memiliki kepentingan di Suriah dan daratan Mesopotamia. Perbedaan kepentingan pada wilayah bekas Kekaisaran Ottoman ini lalu berujung pada sikap penolakan sekutu terhadap “Empat Belas Poin Perdamaian”.

Hasil dari dua perjanjian selanjutnya, Perjanjian Sevres dan Perjanjian Lausanne pun tidak signifikan. Dua perjanjian ini terjadi pada momentum senjakala Dinasti Utsmaniah ditandai dengan penyerahan wilayah kesultanan kepada sekutu Perang Dunia I (Prancis, Inggris, Yunani, dan Italia). Walau memuat hak atas kemerdekaan Suku Kurdi oleh Liga Bangsa-Bangsa melalui referendum, Perjanjian Sevres gagal memenuhi tuntutan itu akibat pergeseran kepentingan geopolitik

sekutu di wilayah Mosul dan nilai ekonomi Mesopotamia, menyusul tabrakan kepentingan kekuatan nasionalis Kemal Ataturk yang tengah menguat di internal Turki. Setelah pasukan Ataturk mengalahkan tentara rezim lama, negosiasi atas wilayah Kurdistan pada Perjanjian Lausanne menghasilkan penyerahan Kurdistan ke dalam teritori Turki modern.

Walaupun nasionalis Kurdi mengajukan petisi kepada pihak Inggris berisi tuntutan atas hak otonomi Kurdi untuk dihormati, namun kepentingan strategis Inggris di Kurdistan berkurang seiring dengan keuntungan teritorial Turki dalam perang kemerdekaannya, sehingga protes Kurdi terhadap perjanjian tersebut akibatnya dikesampingkan dalam menghadapi kepentingan geopolitik strategis Inggris. Hasil dari periode manuver politik yang intens ini adalah pada tahun 1923, wilayah Kurdistan telah terbagi menjadi lima negara yang berbeda: Turki, Irak, Iran, Suriah dan bekas Uni Soviet.

Eskalasi represi yang dihadapi orang-orang Kurdi di negara-negara yang mereka diami sangat dipengaruhi oleh faktor struktural yang memperparah diskriminasi kultural. Secara geopolitik, wilayah Kurdistan kaya akan potensi agrikultur, kaya akan sumber mineral untuk berbagai komoditi seperti tembakau, kapas dan biji-bijian gandum, tembaga, kromium, besi, dan batu bara (McDowall, 2005, p. 6). Selain itu, konsentrasi minyak yang menjadi komoditi utama wilayah Kurdi, mempertemukan kepentingan geostrategi antara Turki, Iran, Suriah, dan Irak (Yildiz, 2005, p. 7). Kontrol terhadap wilayah Kurdistan berarti kontrol sepenuhnya terhadap eksplorasi, ekstraksi, dan transportasi potensi sumber daya, sehingga faktor kepemilikan atas kontrol ini menaikkan tensi rezim-rezim yang sedang

berkuasa terhadap orang-orang Kurdi yang masih hidup di wilayah itu. Kepentingan atas akses, terutama minyak, sejak Perang Dunia II, membuat rezim negara-negara tersebut untuk tidak menyerahkan wilayah Kurdistan. Sentimen-sentimen kultural yang membawa narasi Arabisasi (Nasionalisme Arab), tidak lain merupakan pertimbangan ekonomi-politik.

Sejarah mencatat berbagai episode kekerasan rezim penguasa terhadap suku Kurdi di negara-negara yang mereka diami. Irak, misalnya, rezim Saddam Hussein melancarkan serangan senjata kimia terhadap populasi Kurdi-Iraq yang bermukim di utara Kota Halabja pasca Perang Teluk. Serangan genosid ini dicatat sejarah dengan nama *Halabja Massacre* (Kinsley, 1991). Republik Turki sejak berdiri semasa Mustafa Kemal Ataturk di tahun 1923 hingga pasca kudeta militer 1980, supresi terhadap identitas Kurdi terus terjadi, selain deportasi, secara kultural pelarangan bahasa kurdi juga diberlakukan (Panico, 1999). Pemerintah Iran juga secara sistematis memberlakukan kebijakan diskriminatif terhadap masyarakat etnis Kurdi di ranah hak-hak ekonomi, akses makanan dan air, perumahan yang layak, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan dalam budaya (Amnesty International, 2008). Pemerintah Suriah melucuti hak sipil dan politik orang-orang Kurdi Suriah melalui penghapusan status kewarganegaraan mereka Suriah lewat *Hasakeh Census* pada tahun 1962 yang dampaknya masih terasa hingga hari ini.

Terjangan demi terjangan kekerasan yang dirasakan oleh orang-orang Kurdi merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan. Selain faktor perbedaan kultural dan sejarah keturunan Kurdi dengan komunitas etnis Arab, konflik justru mengemuka akibat pertimbangan politik komunitas Kurdi yang kontra terhadap rezim sektarian

serta nilai ekonomi atas wilayah mereka. Bahkan, organisasi politik Kurdi kerap kali dijadikan komoditas politik kekuatan regional maupun imperialisme barat untuk agenda politik tertentu. Berdiri tanpa pembelaan, suku Kurdi menyambut lontaran represi dan diskriminasi mereka dengan gerak perlawanan independen. Salah satu entitas politik Kurdi di Suriah bernama Rojava kini sedang memainkan peran sentral di tengah struktur konflik regional yang diapit oleh tiga kekuatan; Rezim Baathis, negara-negara pan-Arab, dan jaringan teroris seperti IS (*Islamic State*).

Rojava merupakan administrasi otonom yang berada di wilayah barat Kurdistan terletak di bagian utara Suriah yang berdiri di paruh terakhir tahun 2013. Rojava terdiri dari tiga zona otonom yakni, Cizire (al-Jazira), Efrin (Afrin), dan Kobane (Ayn al-Arab). Ketiga zona otonom ini dinamakan Kanton (*Cantons*) yang dikelola secara konfederal. Sumber pemikiran ini yang lalu disebut oleh Abdullah Ocalan¹ dengan istilah Demokrasi Konfederalisme. Terdapat tiga pilar dalam demokrasi konfederalisme: emansipasi perempuan, pembuatan kebijakan di ranah akar rumput (*grassroots policymaking*), dan perlindungan ekologi (Barkhoda, 2016, p. 81).

Gelombang demokratisasi Musim Semi Arab (*Arab Spring*) di tahun 2011 tidak saja membuka kemungkinan untuk perubahan dinamika konflik Suriah,

¹ Abdullah Ocalan merupakan pemimpin Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah organisasi militan Kurdi di Turki. Pemikiran Ocalan memberikan pengaruh besar terhadap perjuangan Kurdi modern, sekaligus tokoh utama di balik konflik Kurdi-Turki di tahun 1984. Sekarang Ocalan merupakan tahanan politik Turki dengan sanksi penjara seumur hidup. Dari penjara, Ocalan telah menerbitkan beberapa buku yang menyoroti beberapa inti pemikirannya: Jineologi (feminisme versi Ocalan) dan Demokrasi Konfederalisme. Lebih lanjut, ulasan serta relevansi pemikirannya dapat dibaca lebih lanjut melalui buku *The Theory of Political Thought of Abdullah Ocalan: Kurdistan, Woman's Revolution, and Democratic Confederalism* (2017).

melainkan juga kemungkinan untuk berdirinya daerah otonom Rojava. Konteks berdirinya Rojava tidak dapat dilepaskan dari fakta penarikan tentara Suriah dari daerah utara yang dihidupi oleh mayoritas etnis Kurdi, beberapa pengamat menganggap strategi tersebut ditujukan untuk pengamanan Ibu Kota Suriah, Damaskus, dari pihak oposisi. Fakta lain adalah menguatnya *Democratic Union Party*—PYD (*Partiya Yekitiye Demokrat*). PYD terbentuk di tahun 2003 dan berafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) Turki yang merupakan embrio awal ideologi politik demokrasi konfederalisme.

Setelah beberapa dekade mengalami penolakan oleh rezim Baath terhadap status mereka secara politik maupun kultural, komunitas Kurdi-Suriah bersama dengan etnis minoritas lain mengorganisasikan diri ke dalam Rojava. Dalam sejarah Kurdi, Rojava menjadi sebuah anomali dikarenakan pengorganisasian struktur sosial-politik yang sangat jauh berbeda dengan visi gerakan Kurdi di masa lalu yang mengusung negara nasional etnis Kurdi.

Menurut Yasin Duman, inisiatif Rojava dapat menjadi jawaban dari problem utama konflik khas regional (Timur Tengah) yang dihasilkan dari ketidakmampuan merangkul keberagaman dan keunikan multikultural masyarakat, absennya jaminan atas hak dasar manusia, partisipasi politik, dan visi demokrasi tanpa negara bangsa atau yang disebut *non-state political administration* (Sabio, 2015, p. 410). Selain itu, berbeda dengan manuver politik Kurdi yang lain, inisiatif Rojava tidak lagi mengandalkan intervensi imperialis barat sebagaimana yang terjadi di masa Dinasti Ottoman ataupun seperti model inisiatif Kurdi Iran dan Irak, dari era Republik Mahabad hingga *Kurdish Regional Government* (KRG) di bawah

pimpinan Masoud Barzani, dimana pendekatan *top-down* partai/negara monoetnis. Rojava bersama dengan bantuan afiliasi politiknya, PYD dan TEV-DEM (*Tevgera Civaka Demokratik*) atau *Movement for Democratic Society*, justru menciptakan model pengorganisasian alternatif *post-party politic* (politik pasca-partai) dengan bangunan politik *bottom-up* mengandalkan dewan komunal rakyat, serta sifatnya yang multikultural, anti-monopolistik, dan berorientasi konsensus (Ocalan, 2017, p. 39).

Perhatian masyarakat internasional terhadap Rojava memuncak pada tahun 2014 dan 2015, ketika *People Protection Unit* (YPG) dan *Women Protection Unit* (YPJ), dua unit militer PYD yang menjadi pasukan keamanan Rojava, memainkan peran sentral dalam melawan *Islamic State* di Kobane, sebuah kota di Suriah Utara. Kalangan pengamat dan akademisi melihat hal ini dikarenakan dua faktor: pertama, keberhasilannya melawan IS yang dimana pasukan keamanan Irak sokongan AS telah berusaha keras untuk kalahkan, dan kedua, faktor keunggulan para gerilyawan wanita Rojava (Tax, 2016). Revolusi gender yang mempromosikan kesetaraan gender dalam semua institusi—termasuk unit militer, juga merupakan faktor pembeda yang perlu dicatat dari eksperimen Rojava.

Dalam studi ilmu hubungan internasional, terkhusus pada studi konflik internasional, fenomena Rojava merupakan sebuah anomali yang tidak bisa diabaikan. Eskalasi konflik khas di tengah masyarakat Timur Tengah yang bercorak sektarian, dalam artian potensi konflik berasal dari kompleksitas perbedaan agama, etnis, nasionalisme, dan kultural begitu kompleks, Rojava justru menjadikan ketimpangan struktural dimana isu kesejahteraan sosial dan demokrasi kewargaan

sebagai dorongan utama. Selain itu, konsep demokrasi konfederalisme Rojava yang secara eksplisit meninggalkan kerangka negara-bangsa, sehingga ada perbedaan dengan gerakan separatisme Kurdi sebelumnya, serta keaktifan mereka menangani terorisme internasional, menjadikan Rojava sebagai sebuah fenomena menarik untuk penelitian akademisi ilmu hubungan internasional.

Terlepas dari perayaan atas inisiatif model demokrasi konfederalisme Rojava yang tengah dirayakan oleh banyak intelektual kiri, seperti yang banyak diidentikkan dengan demokrasi Athenian, Komune Paris, ataupun revolusi sosial Spanyol 1930, Rojava sedang berdiri di atas struktur konflik yang sama sekali berbeda. Struktur alternatif Rojava merupakan hasil kompleks Konflik Suriah yang terdiri dari berbagai pertarungan ideologi, akses struktural, dan hegemoni rezim. Struktur konflik yang dihadapi Kurdi-Suriah di masa pembentukan Rojava melibatkan tiga faktor utama, antara lain, Rezim Baathis, Negara-negara Pan-Arab, dan Terorisme IS. Sehingga, penelitian ini akan berfokus terhadap pengaruh struktur konflik tersebut terhadap terbentuknya strategi revolusi yang tengah berlangsung di Rojava. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut untuk mengurai struktur konflik serta pengaruhnya terhadap pembentukan dan perkembangan Rojava menjadi penting.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mencoba untuk memaparkan pengaruh konflik Suriah terhadap perjuangan daerah otonom Kurdi Suriah di Rojava. Titik referensi penelitian ini akan dibatasi dalam rentang waktu kepemimpinan Hafez al-Asad ditandai dengan

pemberlakuan program *Arab Belt* di tahun 1973 hingga tahun 2012 dimana kepemimpinan telah berpindah ke Bashar al-Assad dan wilayah otonom Rojava dideklarasikan di tengah kemelut perang sipil Suriah. Penelitian ini diharapkan mampu mengurai konflik Kurdi-Suriah secara historis beserta variabel-variabel internal dan eksternal konflik Suriah yang mempengaruhi pembentukan daerah otonom Rojava. Sehingga, penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dimensi *Ideas* Konflik Suriah terhadap perjuangan daerah otonom Kurdi-Rojava?
2. Bagaimana dimensi *Material Capability* konflik Suriah terhadap perjuangan daerah otonom Kurdi-Rojava?
3. Bagaimana dimensi *Institutions* konflik Suriah terhadap perjuangan daerah otonom Kurdi-Rojava?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan dimensi *Ideas* Konflik Suriah terhadap perjuangan daerah otonom Kurdi-Rojava
 - b. Untuk menjelaskan dimensi *Material Capability* konflik Kurdi-Suriah terhadap perjuangan daerah otonom Kurdi-Rojava
 - c. Untuk menjelaskan dimensi *Institutions* konflik Suriah terhadap perjuangan daerah otonom Kurdi-Rojava

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun referensi bagi para akademisi Ilmu Hubungan Internasional mengenai Pengaruh Konflik Suriah terhadap Perjuangan Daerah Otonom Rojava.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan secara khusus bagi pemerhati isu demokrasi akar rumput sebagaimana inisiatif yang tengah berlangsung inisiatif di Rojava, dan secara umum bagi para pengamat yang tertarik dengan isu Kurdi dan konflik di Timur Tengah.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan berfokus untuk mengurai struktur historis konflik Kurdi-Suriah terhadap pembentukan daerah otonom Rojava melalui pendekatan *Historical Structure* Robert Cox. Konflik Kurdi-Suriah telah berlangsung selama berdekade, sehingga melalui konsep ini dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang ikut mempengaruhi pembentukan Rojava sebagai sebuah respon agen sosial (Kurdi).

Robert Cox merupakan salah seorang pemikir dalam Teori Kritis². Selain itu, sejak Robert Cox menulis buku *Power, Production, and World Orders (1977)*,

² Dalam hubungan internasional, Teori Kritis berkaitan erat dengan Ekonomi Politik Marxis. Teoritisi Kritis HI yang terkenal adalah Robert Cox dan Andrew Linklater. Pasca Perang Dingin teori-teori besar (*grand theories*) menghadapi tantangan isu-isu baru seperti disintegrasi dan perpecahan negara, perang sipil, gelombang demokratisasi, lingkungan, gender, dst. Jurang teoritik antara isu lokal-global (bahkan personal) yang inilah diisi oleh Teoritisi Kritis. Mereka menolak tiga postulat dasar positivisme, yaitu: realitas eksternal objektif, perbedaan subyek dan obyek, dan ilmu sosial bebas nilai. Menurut Teoritisi Kritis, tidak ada politik dunia atau ekonomi global yang berjalan sesuai dengan hukum sosial yang kekal. Segala sesuatu yang sosial, termasuk hubungan internasional adalah historis. Untuk lebih lanjut, ulasan “Kontribusi Teori Kritis terhadap Studi Hubungan Internasional di Indonesia” dapat dibaca pada artikel jurnal Sonny Sudiar dan Yuniarti pada Jurnal Dauliyah Vol. 2, No. 1, Januari 2017.

perspektif Gramscian mulai diperkenalkan dalam studi Hubungan Internasional (Umar, 2013). Sumbangsih pemikiran Cox ialah kritiknya terhadap konsep-teori positivistik dalam studi HI seperti realisme/neorealisme, penggunaan epistemologi *historical materialism*³ Marxian dalam melihat proses menyejarah struktur konflik dan kekuatan negara di atas panggung global, serta pendekatan kritisnya memasukkan dimensi keberlanjutan proses kekuatan sosial (kelas, gerakan sosial, dst) di konfigurasi lokal dalam memahami struktur konflik dan kekuatan yang terjadi di level negara-global.

The world can be represented as a pattern of interacting social forces in which states play an intermediate though autonomous role between the global structure of social forces and local configurations of social forces within particular countries . . . Power is seen as emerging from social processes rather than taken as given in the form of accumulated material capabilities, that is as the result of these processes. (Paraphrasing Marx, one could describe the latter, neo-realist view as the 'fetishism of power') (Rupert, 2013, p. 162).

Dengan pendekatan *Method of Historical Structure*, Robert Cox mempertanyakan tiga hal. Pertama, bagaimana cara-cara dimana formasi sejarah—yang mencakup aspek politik, budaya, dan ekonomi—telah diproduksi secara sosial. Kedua, bagaimana cara-cara tersebut diberlakukan secara berbeda ke berbagai jenis agen sosial. Ketiga, jenis perlawanan yang ditimbulkan oleh relasi kekuasaan tersebut. Pendekatan ini akan berusaha menyoroti ketegangan dan

³ Secara umum, *Historical Materialism* merupakan teori Marxian tentang perkembangan sejarah masyarakat dengan tesis utama “basis mengondisikan suprastruktur” dan “kesaling-hubungan antar elemen kenyataan”. Dalam perkembangannya, teori ini telah banyak dikembangkan oleh para pemikir Marxian (Karl Polanyi, G.A Cohen, Ellen Meiksins Wood, dst) maupun para pemikir Neo-marxian dan sejarahwan (Jurgen Habermas, Theodor Adorno, Ferdnan Braudel, dst). Pembacaan lebih lanjut mengenai Historical Materialism dapat dibaca di pada dua buku utama Marx: *The German Ideology* dan *A Contribution to the Critique of Political Economy*.

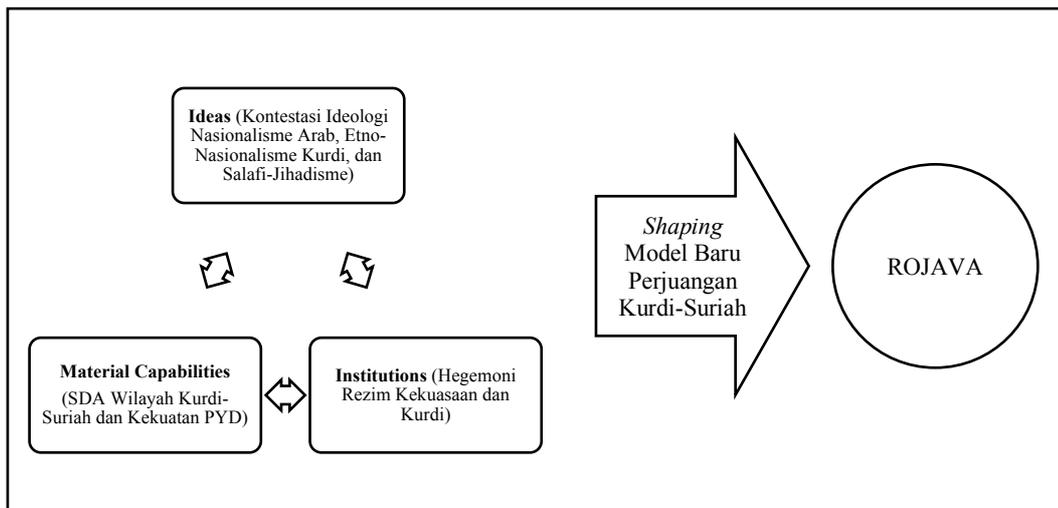
kemungkinan dalam struktur sejarah saat ini untuk membuka cakralawa politik yang memungkinkan agen sosial yang berada pada relasi kekuasaan tersebut memiliki potensi untuk kemungkinan-kemungkinan tatanan alternatif (Rupert, 2013, p. 162).

Dalam publikasi Jurnal *Millenium*, pada artikel *Social Forces, State, World Orders: Beyond International Relations Theory*, Robert Cox menjabarkan kekuatan (*forces*) potensial dalam formasi historis dari yang dia sebut *state/society complex* ke dalam segitiga kekuatan (*triangle of forces*) yang terhubung satu sama lain secara resiprokal (dua arah). Tiga kekuatan tersebut ialah, Ide (*Ideas*), Kemampuan Material (*Material Capabilities*), dan Institusi (*Institutions*).

Kemampuan Material (*material capabilities*) adalah potensi produktif dan destruktif. Dalam bentuk dinamisnya ini hadir sebagai kemampuan teknologi, sedangkan dalam bentuk statisnya sebagai sumber daya alam yang dapat diubah oleh teknologi, persediaan peralatan (misalnya industri dan persenjataan), serta kekayaan yang dapat mengendalikannya (Cox, 1981, p. 136).

Ide (*Ideas*) terbagi menjadi dua; gagasan intersubjektivitas (*intersubjectivity shared notions*) dan gambaran tentang tatanan sosial (*images of social orders*). Pada gagasan intersubjektivitas, ide termanifestasi menjadi serangkaian norma. Sedangkan, jenis yang kedua sangatlah krusial, dimana gambaran tentang tatanan sosial yang dianut oleh berbagai kelompok orang dapat berbeda-beda, bahkan saling bersaing. Benturan antar gambaran kolektif ini memberikan bukti adanya potensi jalur alternatif pembangunan dan menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan material dan institusi untuk munculnya struktur alternatif.

Institusi (*Institutions*) adalah sarana untuk menstabilkan dan melestarikan tatanan tertentu. Institusi mencerminkan relasi kekuasaan yang berlaku di titik asalnya dan cenderung, setidaknya pada awalnya, untuk mendorong gambaran kolektif yang konsisten dengan hubungan kekuasaan tersebut (Cox, 1981, p. 137). Institusi dapat menjadi medan pertempuran dari kecenderungan yang berlawanan, atau merangsang pembentukan institusi alternatif yang mencerminkan kecenderungan yang berbeda. Institusi adalah gabungan Ide (*Ideas*) dan Kekuatan Material (*Material Capabilities*) yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan ide dan kemampuan material.



Gambar. 1 Bagan Operasionalisasi Konsep oleh Penulis

Dari bagan operasionalisasi konsep di atas, investigasi tentang relasi potensi kekuatan dalam formasi historis Kurdi-Suriyah melalui segitiga *Ideas*, *Material Capabilities*, dan *Institutions*, penelitian ini diharapkan dapat memahami konteks historis dari perjuangan tatanan sosial-politik daerah otonom Rojava yang tengah berlangsung hingga hari ini. Selain itu, penulis akan menggunakan beberapa analisis terkait konflik antara lain *intergroup conflicts*, tipologi kekerasan, dan

resolusi konflik yang mendorong perubahan struktur akan membantu untuk mengurai jalinan kekerasan terhadap Kurdi-Suriah untuk mendukung penggunaan *Method of Historical Structure* Robert Cox dalam menganalisis kontestasi kekuatan yang terjadi di antara aktor sehingga mendorong untuk kemunculan eksistensi pengorganisasian struktur alternatif Rojava.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian serta kerangka berpikir yang diajukan, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksplanatif. Pada tingkat eksplanasi penelitian termasuk kedalam penelitian asosiatif, yakni penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih untuk melihat pengaruh. Dua variabel dalam penelitian ini berupa “Konflik Suriah” sebagai variabel independen yang mempengaruhi “Perjuangan Daerah Otonom Kurdi-Rojava” sebagai sebuah variabel dependen. Sebagaimana tujuan dari penelitian eksplanatif, penelitian ini akan menerangkan, menguji hipotesis bahwa variabel konflik Suriah memberikan pengaruh terhadap variabel Kurdi-Suriah secara umum dan secara khusus terhadap pembentukan Rojava dalam hubungan yang bersifat kausal.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data telaah pustaka (*library research*) yakni dengan mengumpulkan data dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti baik berupa buku, jurnal,

laporan, surat kabar maupun artikel di situs-situs internet. Penulis mengumpulkan data terhitung sejak 1 Maret 2021 hingga 1 Mei 2021. Bahan-bahan tersebut diperoleh melalui perpustakaan atau instansi terkait seperti:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar. Penulis melakukan pencarian *e-journal* dan *e-book* di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin terkait topik penelitian “Rojava” dan “Kurdi Suriah” beserta penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi referensi sekaligus bahan komparasi yang penting untuk membedakan penelitian penulis.
- b. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS di Makassar. Penulis mengumpulkan beberapa buku dan jurnal terkait dengan kerangka konseptual Teori Kritis dan Marxisme dalam rumpun keilmuan studi sosiologi seperti karya Max Horkheimer dan Antonio Gramsci.
- c. Perpustakaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS di Makassar. Penulis mengumpulkan banyak referensi di Bank Data Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional. Di antaranya berupa temuan jurnalisme, buku, *e-book*, dan jurnal terkait topik “Konflik Suriah”, “Rojava”, dan kerangka konseptual berupa “Teori Kritis” dalam studi Hubungan Internasional. Sumber-sumber yang dirujuk oleh penulis adalah Robert Cox, Scott Burchill, Reese Erlich, Samer N. Abboud dan Dina Sulaeman serta literatur akademik yang membedah Rojava

seperti karya Michael Knapp, Oso Sabio, dan Thomas Schmidinger yang berkontribusi memetakan struktur Rojava beserta hubungannya dengan konflik Suriah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku terkait topik penelitian “Rojava” dan “Konflik Suriah” beserta teori terkait Teori Kritis dan analisis konflik, laporan (*report*) terkait sejarah dan kondisi umum Kurdi Suriah, jurnal berisi penelitian-penelitian senada, surat kabar dan beberapa situs internet. Selain internet, sumber data juga didapatkan penulis di berbagai perpustakaan sebagaimana telah dipaparkan dalam sub-bagian sebelumnya.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yakni dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada serta hubungan dan pola yang ditemukan pada fakta-fakta tersebut. Dalam penelitian ini, penulis pertama-tama mengumpulkan fakta-fakta terkait konflik Suriah berupa peta aktor dan ideologi lalu menelusuri sejarah politik Kurdi Suriah beserta gelombang kekerasan langsung, struktural, dan kultural yang mereka hadapi sejak proses Arabisasi *Arab Belt* hingga Musim Semi Arab (1973-2011). Selanjutnya, penulis menganalisis temuan fakta tersebut ke dalam tiga aspek yakni ideologi, kapasitas material, dan sarana hegemoni. Teknik analisis ini lebih menekankan pada pengertian alternatif dalam melihat fenomena Rojava daripada untuk memprediksi eksistensinya. Adapun data yang bersifat

kuantitatif, dalam hal ini angka-angka statistik, adalah data penunjang yang dipergunakan untuk memperjelas dan memperkuat analisis kualitatif.

5. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode penulisan deduktif, yakni dengan terlebih dahulu menggambarkan dinamika konflik Suriah dan kondisi umum Kurdi-Suriah, untuk kemudian dibedah melalui sintesis kerangka teoritik menjadi suatu simpulan yang bersifat khusus dimana data-data yang dirujuk menunjukkan pola hubungan dalam perjuangan daerah otonom Rojava.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kritis dan *Method of Historical Structure*

Selama dua dekade terakhir di abad ke-20, terdapat beragam pendekatan post-positivisme dalam studi hubungan Internasional. Post-positivisme muncul semasa 1980an pada medan perdebatan besar keempat (Jorgensen, 2018, p. 178). Debat positivisme dan post-positivisme ini membawa tiga wilayah secara bersamaan untuk diperdebatkan, yakni memikirkan kembali fondasi epistemologi/metodologi, ontologi, dan aksiologi (Kristanti & Maliki, 2008, p. 190). Perdebatan ini mendorong akademisi HI untuk memikirkan kembali teori dan praktik keilmuan keluar dari warisan positivisme yang memiliki keterbatasan kemampuan dan hasrat untuk memahami realitas agenda ‘sebenarnya’ disiplin keilmuan HI.

Penentangan post-positivisme terhadap tradisi pemikiran positivisme (empirisme) meminjam dan memodifikasi epistemologi-epistemologi alternatif dalam ilmu sosial. Smith dalam *Positivism and Beyond* (Smith, 2008, p. 25) mendapati adanya lima epistemologi alternatif yang memberikan pengaruh terhadap post-positivisme HI, yakni Realisme Saintifik (Roy Bhaskar dan Rom Harre), Hermeneutika (Dilthey, Weber Husserl, Ludwig Wittgenstein), Teori Kritis (Mazhab Frankfurt), Feminisme (Sandra Harding, Chintya Weber, Ticker), dan Post-modernisme (Michael Foucault, Jacques Derida, Richard Rotry).

Semangat emansipatoris dan reflektif yang menjadi nyawa post-positivisme salah satunya tercermin dalam Teori Kritis. Epistemologi alternatif Teori Kritis Mazhab Frankfurt memberikan orientasi ulang atas aspek aksiologi keilmuan hubungan Internasional. Nicholas Rengger dalam *Critical Theory and World Politics* menyatakan:

it is the Frankfurt School influenced critical IR theorists who have provided the most general orientation for critical theory in international studies as far as emancipation is concerned, and it is this orientation that essentially drives the critical project in international relations (Rengger, 2001, p. 93).s

Selanjutnya Menurut Andrew Linklater (Linklater, 2008, p. 279), sebagai jalinan teori sosial dan sebagai pendekatan hubungan internasional, terdapat empat pencapaian teori kritis. Pertama, teori kritis mengkritik positivisme dengan menyatakan bahwa pengetahuan tidak muncul dari kenetralan subjek dengan realitas objektif. Sebaliknya, pengetahuan merupakan cerminan dari sebuah tujuan dan kepentingan politik. Kedua, teori kritis menentang klaim empiris tentang dunia sosial yang mengasumsikan bahwa struktur tidak dapat diubah.

Ketiga, belajar dari kelemahan marxisme, teori kritis pasca-marxis memperluas analisis marxian konvensional dengan mempertimbangkan subjek tereksklusi selain kategori 'kelas' dengan menganalisis berbagai agen sosial yang membentuk kontur sejarah. Keempat, teori kritis menilai tatanan sosial berdasarkan kapasitas mereka untuk merangkul dialog terbuka dengan semua pihak lain dan membayangkan bentuk-bentuk baru komunitas politik.

Asal mula pemikiran teori kritis dapat dilacak jauh sejak Abad Pencerahan serta berkaitan dengan teks-teks Kant, Hegel, terutama Marx (Burchill & Linklater,

2015, p. 196). Meskipun demikian, perkembangan khasanah Teori Kritis di abad 20 sangatlah dipengaruhi oleh kelompok pemikiran Jerman bernama Mazhab Frankfurt. Para pemikir Mazhab Frankfurt seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, dan Jurgen Habermas memperkuat istilah Teori Kritis hingga populer dijadikan sebagai lambang filsafat yang mempertanyakan tatanan modernitas sosial dan politik yang berlaku melalui metode kritik (Burchill & Linklater, 2015, p. 196). Mazhab Frankfurt meletakkan batu awal pemikiran untuk memahami sifat-sifat utama masyarakat kontemporer dengan memahami perkembangan sejarah dan sosialnya, merunutkan kontradiksi saat ini, sehingga bisa membuka kemungkinan masyarakat kontemporer dan bentuk-bentuk dominasi yang menyertainya.

Max Horkheimer dalam esainya *Traditional and Critical Theory* (1937) mengurai urgensi perkembangan teori kritis ke dalam tiga asumsi utama: pertama, keyakinan bahwa masyarakat membutuhkan perubahan radikal dan bukan sekedar reformasi; kedua, bahwa teori sudah semestinya dependent dari kesadaran sosial yang ada; ketiga, bahwa konsep ideal tentang objektivitas, bebas nilai (kepentingan), dan independen para teoritikus, sebagaimana berlaku pada ilmu alam, tidak berlaku sama pada ilmu sosial (Horkheimer, 2002, p. 188). Lewat esai ini, Max Horkheimer mengidentifikasi koneksi antara pengetahuan dan kepentingan. Kritik utamanya terhadap teori tradisional dimana terjadi pemisahan antara subjek-objek penelitian adalah abai dengan relasi sosial yang menjadi rahim dimana fakta, persepsi, dan teori diproduksi secara historis. Horkheimer menyebut

tendensi positivisme ilmu alam yang dipakai dalam ilmu sosial-politik ini sebagai marka kebangkitan teknokratisme dalam masyarakat modern.

Perkembangan teori kritis dalam studi Hubungan Internasional bertitik mula pada sumber internal dan eksternal teori disiplin studi ini. Mark Hoffman dalam *Critical Theory and Inter-Paradigm Debate* memaparkan sumber internal tersebut berkuat perkembangan teori kritis yang didorong oleh reaksi yang masif terhadap artikulasi ulang Realisme Kenneth Waltz. Sedangkan secara eksternal, adanya perkembangan teori kritis yang secara terpisah dikembangkan oleh Robert Cox lewat upaya kritiknya terhadap neorealisme (Hoffman, 1987, p. 237).

Robert Cox mengkritisi tradisi pemikiran realisme-neorealisme di tahun 1981 lewat artikel yang berjudul *Social Forces, States, and World Orders: Beyond International Relations Theory*. Dalam tulisan tersebut, Cox memproblematisir premis utama realisme/neorealisme yang memposisikan negara sebagai sebuah “*principle aggregation of political power*” dengan kebijakan luar negeri sebagai ekspresi murni dari kepentingan negara dimana terdapat pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (Cox, 1981, p. 127). Bagi Cox pemisahan ini tidak lagi dapat dipertahankan: negara dan masyarakat sipil secara intrinsik terhubung. Studi Hubungan Internasional harus mampu menjelaskan “pluralitas dari bentuk-bentuk negara yang mengekspresikan konfigurasi berbeda-beda dari kompleks negara-masyarakat (*state-society complex*)” yang secara lebih luas berarti mencoba memahami kekuatan sosial (*social forces*) di level domestik serta hubungannya dengan struktur negara dan tatanan dunia (Hoffman, 1987, p. 237).

Kalimat profetik Robert Cox yang mahsyur “*theory is always for someone and for some purposes*” menunjukkan similaritas dengan kritik Mazhab Frankfurt terhadap netralitas keilmuan sebagaimana yang disebut Horkheimer sebagai *Traditional Theories* atau oleh Cox disebut *Problem-Solving Theories*. Teori selalu memiliki tujuan serta tidak lahir dalam ruang vakum sejarah. Teori merupakan produk dari sejarah yang spesifik pada konteks, refleksi titik waktu tertentu dari sebuah tatanan sosial dan politik yang khas. Sehingga, teori dan seperangkat pengetahuan sendiri memiliki dimensi emansipatoris: sebuah kerangka strategis untuk sebuah tatanan alternatif.

Selain itu, Robert Cox secara epistemologi berangkat dari Materialisme Historis (*Historical Materialism*) Marxian. Terdapat tiga pendekatan dasar Marx yang memberikan pengaruh terhadap metodologi teori kritis. Pertama, konsep dialektika itu sendiri (Leysens, 2008, p. 45). Cox menjelaskan konsep dialektika ke dalam dua level yakni, logika dan sejarah. Level dialektika pemikiran dalam logika mensyaratkan kontradiksi sebagai sebuah panduan untuk penjelasan. Hal ini berarti konsep/teori seharusnya berhubungan dengan realita serta berkorespondensi mengikuti perubahannya. Sedangkan, dialektika pada level sejarah akan membukakan adanya kemungkinan alternatif. Alternatif ini berasal dari “kekuatan sosial yang berlawanan dalam situasi sejarah konkret”. Ketika neorealisme berfokus pada konflik dengan premis bahwa konflik berulang dalam struktur yang tidak berubah, pendekatan dialektis, menurut Cox, justru akan berkontribusi pada perubahan struktural.

Kedua, pendekatan materialisme historis Marxian memasukkan penguraian relasi kekuasaan secara vertikal. Hal ini berarti fokus terhadap relasi kekuasaan tidak saja hirarki di antara aktor-aktor negara, namun juga hirarki yang didasari oleh pembagian divisi tenaga kerja (*division of labour*).

Ketiga, materialisme historis menyingkapi realitas negara dan fokus terhadap relasi antar negara dan masyarakat sipil—*civil society* dalam terminologi Gramscian. Sehingga, negara tidak dilihat berdiri sendiri dan terpisah dari masyarakat sipil sebagaimana neorealisme melihatnya.

Secara garis besar, Robert Cox memperkenalkan pemikiran-pemikiran kunci Gramscian seperti Hegemoni (*Hegemony*), Revolusi Pasif (*Passive Revolution*), Perang Posisi dan Perang Gerakan (*War of Movement and War of Position*), dan Blok Historis (*Historic Bloc*) ke dalam disiplin hubungan internasional (Cox, 1983). Lewat revisi Gramscian atas materialisme historis marxian—dimana struktur seperti basis ekonomi dan suprastruktur seperti politik, kebangsaan, etika, dan ideologi berhubungan secara resiprokal—Cox menghindari reduksi ekonomi deterministik dalam melihat negara dan dunia internasional.

Historisisme Neo-Gramscian Cox melepaskan pengaruh dari historisisme ekonomis Marxian yang mereduksi analisis historis yang statis dari mode produksi yang didorong sebuah hukum yang objektif. Hal ini membuatnya berbeda dengan akademisi marxian lainnya seperti Althusser yang melihat sejarah sebagai sebuah “proses tanpa subjek”, dimana subjek dari sejarah bukanlah para individual melainkan struktur relasi produksi yang menentukan agen-agen produksi beserta fungsi mereka dalam sistem yang lebih besar. Menurut Cox pandangan strukturalis-

fungsionalisme seperti sangatlah bersifat statik dan tidak dapat menjelaskan bagaimana sebuah perubahan dapat terjadi. Adrian Budd menyertakan:

In contrast, Cox places conscious human activity at the centre of his social analysis. He recognizes that there is 'a sense in which structures are prior to individuals in that children are born into societies replete with established and accepted social practices', but these practices 'are the creation of collective human activity... made by collective human activity and trans- formed through collective human activity' (Budd, 2013, p. 21).

Berkebalikan dengan pandangan strukturalis ini, Cox menempatkan aktivitas manusia (*human activity*) sebagai pusat dari analisisnya. Kelas diilustrasikan oleh Cox tidak sebagai sebuah “struktur” atau “kategori”, melainkan sesuatu yang terjadi dalam hubungan manusia yang mengandung manusia nyata dan konteks yang nyata. Dari sini kontribusi utama Cox dan pandangan Neo-Gramscian adalah bagaimana kelas—yang awalnya terlihat statik—dilihat sebagai sesuatu yang terus berubah dan subjektif. Selanjutnya, dari pemahaman kelas yang subjektif, Adrian Budd menjelaskan bagaimana pandangan heuristik Cox.

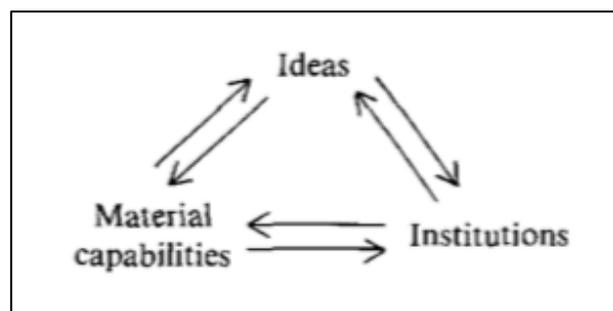
Cox argues that production relations create merely 'the potential for class', the real emergence of which depends on both common experiences and the subjective, ideological, and political factors that contribute towards the translation of experience into 'common perceptions of the cleavages in society'. These perceptions, in turn, give rise to class identity and a 'capacity for common action' and so underpin class struggle which, for Cox, is the heuristic model for the understanding of structural change (Budd, 2013, p. 22).

Potensi kebangkitan kesadaran kelas terletak pada kemunculan dari pengalaman objektif dan subjektivitas itu sendiri, faktor ideologi, dan faktor politik. Hal ini lalu yang diterjemahkan menjadi kesamaan persepsi atas pengalaman melihat pembelahan dalam masyarakat. Kesamaan persepsi ini yang lalu menjadi

katalisator dari *common action* atau dalam terminologi marxian sebagai sebuah perjuangan kelas (*class struggle*).

Bagi Cox, perjuangan *common action* kekuatan sosial dapat menjadi sebuah alternatif atau “sebuah struktur rival” dari struktur yang berkuasa. Pendekatan Cox dalam melihat kemunculan struktur rival disebut dengan istilah *Method of Historical Structure* (MHS) atau *Framework of Action* (Sinclair, 1996, p. 3). Dengan unit analisis “hubungan antar negara-masyarakat” atau apa yang Cox sebut *state-society complex*, pendekatan MHS akan mengidentifikasi kontradiksi dan konflik di dalam sebuah struktur sejarah yang menciptakan sebuah perubahan dalam kerangka aksi bersama (*common action*).

Terdapat tiga kategori kekuatan yang berinteraksi pada sebuah struktur: kapabilitas material (*material capabilities*), ide (*ideas*), dan institusi (*institutions*) (Cox, 1981). Tiga faktor ini saling berhubungan dengan secara resiprokal. Dalam *State Society and Social Forces*, Robert Cox menggambarannya seperti berikut:



Gambar. 2 Struktur dimensi kekuatan dalam *Method of Historical Structure*.
Sumber: (Cox, 1981, p. 136).

Kemampuan material (*material capabilities*) adalah potensi produktif dan destruktif. Dalam bentuk dinamisnya hadir sebagai kapasitas organisasi dan teknologi, sedangkan dalam bentuk statisnya sebagai sumber daya alam yang dapat

diubah oleh teknologi, persediaan peralatan (misalnya industri dan persenjataan), serta kekayaan yang dapat mengendalikannya (Cox, 1981, p. 136).

Ide (*Ideas*) terbagi menjadi dua; gagasan intersubjektivitas (*intersubjectivity shared notions*) dan gambaran tentang tatanan sosial (*images of social orders*). Pada gagasan intersubjektivitas, ide termanifestasi menjadi serangkaian norma. Sedangkan, jenis yang kedua sangatlah krusial, dimana gambaran tentang tatanan sosial yang dianut oleh berbagai kelompok orang dapat berbeda-beda, bahkan saling bersaing. Benturan antar gambaran kolektif ini memberikan bukti adanya potensi jalur alternatif pembangunan dan menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan material dan institusi untuk munculnya struktur alternatif (Cox, 1981, p. 136).

Institusi (*institutions*) atau “institusionalisasi” adalah sarana untuk menstabilkan dan melestarikan tatanan kekuasaan tertentu. Institusi mencerminkan relasi kekuasaan yang berlaku di titik asalnya dan cenderung menjadi kendaraan hegemoni penguasa (Cox, 1981, p. 137). Institusi dapat menjadi medan pertempuran dari kecenderungan yang berlawanan, atau merangsang pembentukan institusi alternatif yang mencerminkan kecenderungan yang berbeda. Sebagaimana Timothy J. Sinclair menerangkannya:

Institutions, or as Cox puts it, ‘institutionalization’, is the way a particular order is stabilized and perpetuated. Institutions are a vehicle for creating hegemony, but they may also take on a life of their own and may also become a ‘battle-ground’ for opposing tendencies, or rival institutions may compete with each other (Sinclair, 2016, p. 4).

Dalam konteks penanganan konflik internal, institusionalisasi berkaitan erat dengan konsep hegemoni Gramsci. Terdapat kemungkinan pengerahan kekuatan

material (seperti kekuatan militer) pada semua struktur konflik, dimana pihak yang kuat dapat mengalahkan pihak yang lemah. Namun, tindakan ini tidak akan dipakai dalam memastikan dominasi dari pihak yang kuat secara lebih jauh hingga di titik dimana pihak yang lemah menerima relasi kekuasaan yang ada secara sah. Pada titik ini penggunaan institusi—sarana hegemoni—sebagai sebuah strategi untuk menggalang representasi kepentingan yang bervariasi dan kebijakan yang lebih bersifat universal. Namun, institusi juga dapat bersifat hegemonik dan non-hegemonik, sebagaimana yang ditulis oleh Anthony Leysens:

Institutions can be hegemonic or non-hegemonic. Hegemonic institutions accommodate diversity through consensus, which is grounded within a universal collective image (legitimacy) and distributes rewards to subordinate groups without endangering the position of the dominant group. In this way, legitimacy is ensured. Non-hegemonic structures are characterised by the use of power in a coercive manner and the absence (in varying degrees) of consensus (legitimacy). The existence of hegemony, however, depends not only on institutions but also on material capabilities and ideas/ideology (Leysens, 2008, p. 49).

Fungsi hegemonik dari institusi dapat hilang apabila adanya perubahan pada faktor material ataupun tantangan ideologi yang menantang tatanan sebelumnya.

Cox menyebutkan:

Hegemony cannot, however, be reduced to an institutional dimension. One must beware of allowing a focus upon institutions to obscure either changes in the relationship of material forces, or the emergence of ideological challenge to an erstwhile prevailing order. Institutions may be out of phase with these other aspects of reality and their efficacy as a means of regulating conflict (and thus their hegemonic function) thereby undermined. they may be an expression of hegemony but cannot be taken as identical to hegemony (Cox, 1981, p. 137).

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa hubungan resiprokal dalam segitiga kekuatan (gambar.2) dapat menentukan efektifitas pengaruh berupa hegemoni pada sebuah struktur yang dapat bermuara pada munculnya struktur tandingan yang mengekspresikan pertumbuhan kemungkinan alternatif. Pendekatan *Method of Historical Structure* memiliki keterbatasan untuk menjelaskan keseluruhan dunia. Fokus utamanya berada pada lingkup pengaruh di level aktivitas kolektif manusia dalam babak waktu tertentu. Hasil dari penelusuran proses menyejarah hubungan struktur dan aktivitas manusia tersebutlah yang akan menjelaskan bagaimana kekuatan sosial baru (*new social forces*) dapat lahir.

B. Analisis Konflik dan Tipologi Kekerasan

Pengaruh Teori Kritis terhadap teori-teori konflik menghasilkan irisan yang mendekonstruksi analisis konvensional konflik. Tantangan dari analisis konflik adalah bukanlah melawan perang internasional atau intervensi dalam konflik intrastate, melainkan mendorong teori dan praktik baru yang dapat menyelesaikan konflik dan memungkinkan orang dalam situasi ini membangun struktur sosial baru yang mewakili kepentingan dan kebutuhan mereka. Hal inilah yang menjembatani fase “*critical turn*” post-positivisme dan Teori Kritis dengan kebutuhan analisis konflik kontemporer.

Dalam Jurnal *Peace Review*, Joseph Scimecca mengidentifikasi tiga jenis pendekatan untuk analisis konflik: manajemen konflik, penyelesaian konflik, dan resolusi konflik. Masing-masing tidak hanya diinformasikan oleh epistemologi dan

ontologi yang berbeda, tetapi juga oleh tujuan yang berbeda (Scimecca, 1993, p. 392).

Manajemen konflik, seperti yang dinyatakan Scimecca, “mengasumsikan bahwa konflik adalah masalah organisasional yang dapat dikelola dengan mengubah kondisi di dalam institusi sosial”. Penekanannya bukanlah untuk mengubah struktur sosial, tetapi untuk mencari cara untuk mengakomodasi kepentingan kelompok dan individu yang tidak senang dengan memberikan mereka lebih banyak akses ke struktur politik dan ekonomi. Sedangkan, penyelesaian konflik ditujukan untuk menekan keberadaan konflik melalui paksaan atau ancaman kekerasan. Jenis intervensi konflik ini terkait dengan penanganan realitas yang tidak sejalan dengan pihak-pihak yang sedang bersaing. Seperti manajemen konflik, penyelesaian konflik diarahkan untuk melestarikan struktur kekuasaan masyarakat, bukan mengubahnya.

Hal yang perlu menjadi sorotan adalah bagaimana strategi penyelesaian konflik (*conflict settlement*) dan manajemen konflik (*conflict management*) dikuatkan oleh prinsip-prinsip politik realisme dan positivisme. Niccolo Machiavelli dalam bab *Of Cruelty and Clemency, And Whether It Is Better to Be Loved or Feared* dalam buku *The Prince* telah memperkenalkan fondasi pemikiran realisme analisis konflik di permulaan Renaissance (Yordan, 2003, p. 67). Intisari bab tersebut berkaitan dengan keberhasilan seorang ‘penguasa’ dalam menjalankan masyarakat melalui strategi ganda dalam konflik dengan menimbulkan ketakutan atau sebaliknya keamanan. Penggunaan dua strategi ini bergantung pada kepentingan “*the prince*” dalam menjaga kekuasaan politik dengan mengorbankan

sektor sosial lain yang menginginkan kekuasaan yang sama—tanpa mengubah satu pun struktur yang ada.

Pengaruh positivisme dalam penyelesaian konflik dan manajemen konflik dipengaruhi oleh Auguste Comte di paruh pertengahan abad sembilan belas. Pemberlakuan kaidah saintifik—pengetahuan objektif, hukum kausalitas fenomena, dan observasi—terhadap realita sosial membentuk cara pandang tentang tujuan dari ilmu sosial. W.T Jones dalam *Kant and the Nineteenth Century* menerangkan:

Comte can be considered a founder of this new point of view (positivism) insofar as he insisted that the function of science is not to show why things happen but to generalize about how they happen—to provide, that is, an instrument of control rather than a knowledge of ultimate reality (Jones, 1980, p. 202).

Positivisme mengubah negara sebagai aparatus teknis yang menghomogenisasi skema kontrol terhadap semua proses sosial (Yordan, 2003, p. 67). Struktur sosial yang ada bersifat terberi sebagai bagian dari realitas objektif dan terpisah, tanpa mempertanyakan bagaimana realitas tersebut dapat terjadi. Sehingga, segala upaya analisis konflik akan bias untuk memenuhi fungsi tersebut dimana tereduksi menjadi sebuah agen kontrol sosial.

Pada esensinya, kedua bentuk intervensi konflik dalam tradisi pemikiran realisme-positivistik fokus terhadap keberlanjutan struktur kekuasaan yang sudah mapan, bukan pada perubahannya. Permasalahannya terletak pada ketidakmampuan keduanya dalam menyelesaikan konflik sosial. Terdapat kemungkinan besar adanya tindakan kekerasan yang justru berujung pada krisis kepercayaan terhadap legitimasi struktur kekuasaan yang ada. Pilihan lain yang

mungkin adalah dengan memberikan perubahan sosial dengan memenuhi sejumlah kebutuhan dan kepentingan yang terbatas sebagai ganti dari sektor sosial yang dikorbankan. Namun, intervensi konflik seperti ini hanya mengamankan rasa damai yang palsu atau, apa yang disebut Johan Galtung sebagai perdamaian negatif (*negative peace*)—suatu kondisi di mana kekerasan langsung tidak ada, tetapi bentuk kekerasan budaya dan struktural masih dipraktikkan (Galtung, 1996, p. 31).

Pencapaian “*critical turn*” akademisi Teori Kritis di 1990an yang mengkritisi ontologi dan epistemologi realisme-positivistik memperkuat dimensi lain analisis konflik yang berbeda dari dua yang sebelumnya yakni resolusi konflik (*conflict resolution*). Resolusi konflik tidak bertujuan untuk menyelesaikan ataupun mengelola konflik, melainkan untuk panggilan untuk transformasi sosial—perubahan struktur yang menjadi sumber kekerasan. Hal ini sejalan dengan definisi konsep Perdamaian Positif Johan Galtung dimana kondisi ketiadaan kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kultural (Galtung, 1996, p. 32). Dalam pendekatan *human security*, ancaman fisik dan non-fisik terhadap eksistensi manusia baik dalam aspek sosial, ekonomi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup merupakan konsideran yang penting dalam menciptakan rasa “aman” dan “keamanan” bagi manusia (Burhanuddin, 2017, p. 48).

Kekerasan langsung atau *direct violence* adalah kekerasan fisik yang disengaja untuk menyakiti seorang individu atau kelompok terhadap individu dan kelompok lain. Linda Dwi Eriyanti mengutip pemikiran Johan Galtung mengenai kekerasan langsung:

...gangguan yang harusnya dihindari terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk hidup layak, sesuatu yang menurunkan

tingkat kepuasan kebutuhan riil di bawah potensi yang ada. Ancaman penggunaan kekerasan juga merupakan kekerasan. (Eriyanti, 2017).

Sedangkan, kekerasan struktural adalah kekerasan yang dipaksakan oleh sekelompok orang secara tidak langsung melalui sistem sosial dengan tujuan sesuai dengan kepentingan politik, sosial, dan ekonomi mereka (Kent, 1993, p. 382). Terakhir, kekerasan budaya berfungsi untuk melegitimasi kekerasan langsung dan struktural, memotivasi para aktor untuk melakukan kekerasan langsung atau untuk menghilangkan penangkal kekerasan struktural; bisa disengaja atau tidak disengaja (Galtung, 1996, p. 31).

Pengabaian terhadap faktor-faktor subjektif untuk keakuratan prediksi, kuantifikasi, analisis ‘santifik’, dan spesialisasi area studi, membuat pendekatan positivistik gagal dalam menganalisis konflik dan kekerasan yang berbasis identitas (Yordan, 2003, p. 69). Secara lebih luas pendekatan positivistik gagal dalam melihat “kompleksitas dimensi manusia”. Konflik sosial adalah kombinasi elemen dari subjektifitas (seperti faktor-faktor non-material) dan objektif (seperti faktor-faktor material). Sehingga, dibutuhkan pendekatan yang jauh lebih holistik yang mengandalkan pendekatan multidisiplin dalam melihat konflik. Carlos L. Yordan mengutip pendapat Paul Burton:

Thus, Burton’s holistic approach supports a multidisciplinary project that can account for all aspects of human behavior and, simultaneously, explains how social realities (e.g. the organization of society) influence individual and group behavior in social settings. The first task of this project is geared at understanding the ontological needs that motivate human behavior, while the other tries to understand how social structures can either hamper or promote the satisfaction of these needs (Yordan, 2003, p. 69).

Paul Burton mengutip teori psikologi Abraham Maslow untuk menjelaskan motivasi dan kepuasan dari kebutuhan dasar manusia yang menjadi dorongan sebuah konflik. Menurutnya, sistem sosial yang menghalangi kebutuhan-kebutuhan dasar akan mendorong individu dan kelompok dalam sistem tersebut untuk mengubah sistemnya. Maslow menuliskan bahwa “menggagalkan kebutuhan ini menghasilkan perasaan rendah diri, lemah, dan tidak berdaya. Perasaan ini pada gilirannya menimbulkan ketidaksetujuan” (Steinmeyer, 2017, p. 25). Legitimasi sebuah sistem sosial didasari pada kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Sistem yang mengabaikan kebutuhan ini akan senantiasa berhadapan dengan perpecahan politik dan kekerasan yang berujung pada sebuah perang sipil.

Pertimbangan terhadap perubahan sebuah struktur kondisi sosial yang timpang sebagai sebuah sumber konflik meniscayakan adanya kontestasi kekuatan di antara kelompok yang berbeda. Konflik antar kelompok tersebut dapat dijelaskan melalui teori *intergroup conflicts*. Teori ini bersumber dari pemikiran bahwa setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga terjadi perlombaan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya yang terbatas (Bornstein, 2003, p. 129). *Intergroup conflicts* dapat disimulasikan sebagai sebuah bentuk tim permainan (*team game*) dalam suatu kompetisi dimana kemenangan berbanding lurus dengan seberapa banyak kontribusi relevan dibandingkan dengan kelompok lainnya, seperti usaha (*efforts*), uang (*money*), keberanian (*bravery*) (Bornstein, 2003, p. 131).

Terdapat beberapa indikator penting untuk menjelaskan keberadaan *intergroup conflicts*. Pertama, teori konflik antar kelompok penting untuk

menganalisis penyebab terjadinya konflik. Salah satu penyebab terjadinya adalah kelangkaan sumber daya sehingga suatu kelompok bergesekan dengan kelompok lainnya (Takacs, 2003, p. 115). Kedua, mobilisasi anggota dalam konflik antar kelompok dapat terjadi karena persepsi bahwa kelompok lainnya dalam suatu titik tertentu menjadi ancaman bagi kelangsungan kelompok tersebut (Takacs, 2003, p. 115). Ketiga, konflik antar kelompok dapat terjadi ketika memiliki situasi etnosentrisme—superioritas satu etnis di atas etnis lain—yang tinggi di dalamnya (Takacs, 2003, p. 116). Keempat, adanya eksklusi terhadap suatu kelompok dalam waktu yang cukup lama, sehingga memungkinkan untuk terjadinya titik balik menjadi sebuah konflik antar kelompok (Tropp, 2012, p. 3). Hal tersebut memberikan justifikasi anggota kelompok yang tereksklusi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain yang berada di wilayah mereka. Kelima, perbedaan ideologi merupakan salah satu indikator yang mempertajam konflik. Ideologi di sini dapat dibagi ke dalam beberapa dimensi seperti persepsi tentang stabilitas ataupun *status quo*, tradisi sosial, dan terutama persepsi tentang kesejahteraan sosial (Cohrs, 2012).

Sintesis kerangka teoritik *Method of Historical Structure* Robert Cox beserta sumbangan pemikiran mengenai studi konflik: tiga level kekerasan Johan Galtung, dorongan untuk perubahan struktur sebagai resolusi konflik Paul Burton serta teori *intergroup conflicts* diharapkan dapat membantu menjelaskan bagaimana hubungan antara konflik Suriah dengan kecenderungan kelompok Kurdi Suriah untuk menciptakan struktur alternatif berupa Rojava. Pendekatan *Method of Historical Structure* akan menjabarkan faktor-faktor internal-eksternal dalam

sejarah konflik Suriah lewat segitiga kekuatan—ide, kapasitas material, dan institusi. Sedangkan kontribusi studi konflik: *intergroup conflicts*, pemahaman level kekerasan, dan dorongan untuk perubahan struktur akan membantu untuk mengurai jalinan kekerasan berlangsung dalam hal ini langsung, struktural, dan kultural terhadap Kurdi-Suriah, serta analisis kontestasi kekuatan yang terjadi di antara aktor sehingga mendorong untuk kemunculan eksistensi pengorganisasian struktur alternatif Rojava.

C. Penelitian-Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis juga melakukan ulasan terhadap penelitian yang pernah dikerjakan oleh akademisi yang berkaitan dengan topik penelitian yakni Perjuangan Daerah Otonom Rojava maupun Kurdi Suriah secara umum. Hal ini dinilai perlu sebagai referensi terhadap penelitian ini, sekaligus memperjelas diferensiasinya di antara penelitian-penelitian dengan tema serupa. Pertama penulis akan membahas penelitian yang berjudul “*The Kurdish Movement and the Democratic Federation of Northern Syria: An Alternative to the Nation-State Model?*” yang ditulis oleh Pinar Dinc (2020).

Gerakan Kurdi seiring waktu mengalami pergeseran paradigma, dari gerakan berbasis agenda negara nasionalis Kurdi menjadi proyek yang Ocalan sebut sebagai demokrasi tanpa negara (*non-state political administration*). Pinar Dinc mengemukakan tiga masalah utama yang perlu dipertanyakan dalam praktik demokrasi konfederalisme Rojava. Pertama, pengaruh transformasi ideologi PKK dari ideologi politik Marxisme-Leninisme ke Nasionalisme dan Nasionalisme

menjadi gagasan Demokrasi Konfederalisme. Kedua, narasi sekaligus kontradiksi internal politik identitas Kurdi beserta pertunjukan elemen-elemen identitas kultural Kurdi (bendera, simbol, dan potret ‘kultus’ Abdullah Ocalan) di tengah ide utama Rojava untuk menghapuskan nasionalisme tribal. Ketiga, melalui pendekatan *Multitude* oleh Hardt dan Antonio Negri, Pinar Dinc menguji tesis “Demokrasi Radikal Rojava sebagai sebuah bentuk alternatif dari negara-bangsa modern” dimana identitas (seperti ras, gender, seksualitas, kelas) tidak menentukan hirarki kekuasaan.

Temuan Pinar Dinc menunjukkan adanya ambiguitas antara teori dan praktik yang tengah terjadi di Rojava. Walau gerakan Kurdi di Rojava berhasil menginklusi etnis minoritas lain ke dalam demokrasi radikal mereka, namun masih jauh dari eksklusi ide besar tentang kebangsaan Kurdi yang sarat akan kepemimpinan Kurdi (terutama pengkultusan Ocalan) dan bayang-bayang kedigdayaan Kurdistan di masa lalu.

Melalui konsep *Multitude*, Pinar Dinc mengidentifikasi Rojava masih terjebak dalam “kosa kata nasionalisme modern”, bahkan lebih jauh merupakan outcome dari modernitas itu sendiri. Rojava merupakan sebuah langkah awal dari jalan panjang model alternatif dari negara-bangsa modern. Indikator demokrasi radikal Hardt dan Negri yang dikutip oleh Pinar Dinc memerlukan tiga fase pokok yakni membuat identitas yang tereksklusi dan tersubordinasi dari sistem menjadi tampak, menghentikan politik identitas, dan menjaga fungsi pemberontakan menuju projek revolusioner: penghapusan identitas itu sendiri.

Kedua, penulis akan mengulas artikel yang ditulis Vittoria Federici (2015) yang berjudul “*The Rise of Rojava: Kurdish Autonomy in the Syrian Conflict*”. Vittoria Federici fokus menganalisis peluang dan tantangan di level praktikal terkait Rojava dalam kerangka konflik Suriah. Pembelahan agenda politik antara PYD dengan KNC menyisakan kesan “elitisme” di tubuh PYD—sehingga representasi mereka mengatasnamakan Kurdi Suriah dipertanyakan. Walau begitu, PYD merupakan satu-satunya partai dengan kapasitas organisasional dan militer yang mampu mengambil momentum di Perang Sipil Suriah. Tantangan utama Rojava terdapat pada politik-isolasi PYD yang menolak membentuk koalisi yang lebih luas dengan Kurdi Suriah, terlebih lagi dengan sipil beretnis Arab, yang nantinya akan berguna dalam konteks pasca-perang Suriah.

Menurut Vittoria Federici, Kurdi-Suriah memiliki kekurangan dalam sejarah yang dapat memantik mobilisasi nasionalis, kekurangan simbol perjuangan nasional ketika dibandingkan dengan Irak (*Halabja Massacre*) atau Iran (Republik Mahabad). Sehingga, pembebasan Kobane di tahun 2015 memantik kembali keinginan nasionalis kurdi suriah untuk mengklaim otonomi lewat pencapaian teritori yang lebih luas dari ISIS. Selain itu, pasca pembebasan Kobane, terjadi peningkatan koordinasi yang lebih luas dengan pihak Amerika Serikat, KRG, dan YPG untuk memberikan pengaruh di regional. Salah satu contohnya adalah pembersihan nama YPG di media-media barat dimana dianggap sebagai partner lokal Amerika Serikat melawan ISIS—terlepas afiliasi mereka dengan PYD yang dicap kelompok teroris. Kesimpulan yang ditarik oleh Vittoria Federici adalah proyek pembebasan nasional Kurdi memiliki sedikit peluang untuk bertahan, kecuali PYD melakukan upaya

tegas untuk meningkatkan daya tariknya di antara populasi Kurdi dan non-Kurdi di Suriah, sementara juga melibatkan faksi yang lebih moderat dan pragmatis dalam oposisi rezim Suriah.

Ketiga, penelitian Gusti Ayu Meisa Kurnia Dewi Silakarma (2016) berjudul **“Resistensi Perempuan Dalam Konflik: Tinjauan Terhadap Yekineyen Parastina Jine/Kurdish Women Protection Unit (YPJ)”**. Penelitian ini berfokus pada YPJ (*Yekineyen Parastina Jine*) atau *Kurdish Women Protection Unit* yang merupakan unit militer perempuan PYD yang melindungi Rojava secara langsung di area konflik. Peristiwa Pembebasan Kobane menunjukkan efektifitas posisi YPJ dan afiliasinya YPG dalam upaya perebutan teritori ISIS. Meisa bergerak lebih jauh meneliti motif dari para perempuan YPJ di tengah intensitas kekerasan, serta kompleksitas unsur internal dan eksternal konflik terhadap radikalisme mereka. Rumusan masalah yang diajukan oleh Meisa adalah “Mengapa perempuan-perempuan Kurdi dalam YPJ di Rojava melakukan perlawanan bersenjata terhadap Islamic State (IS) di Suriah?”.

Penelitian Meisa mengambil jarak dengan alasan tunggal terkait radikalisme perempuan, menurutnya masalah-masalah yang dihadapi perempuan di area konflik berisi kompleksitas dan saling terinterkoneksi satu dengan lainnya. Melalui pendekatan interseksionalitas, menurut Meisa mengurai para perempuan YPJ dikondisikan secara subjektif oleh hasil dari irisan keadaan personal seperti ras, gender, kelas, etnisitas, dan nasionalitas yang mereka miliki. Selanjutnya, melalui kacamata *intergroup conflicts* yang berakar dari kontestasi ideologi tentang

perempuan: Demokrasi Konfederalisme dan Salafi Jihadisme, Jineology dan IS Women Manifesto, serta prinsip-prinsip dasar ideologi kelompok YPJ dan ISIS.

Pertama, hasil penelitian Meisa adalah gender tidak selalu berkaitan dengan subordinasi pria terhadap perempuan. Genderisasi yang ditemukan Meisa terjadi dari negara (maskulin) ke suatu etnis minoritas (feminin) dan tetap dipandang sebagai bentuk yang mengopresi mereka yang berada dalam kategorisasi feminin. Kedua, interseksi operasi yang terjadi dari satu dekade ke dekade lainnya memberikan *self-definition* secara rasional terhadap perempuan-perempuan Kurdi. Ketiga, situasi perempuan-perempuan Kurdi yang mengangkat senjata terhadap IS ini masuk dalam kategori konflik antar kelompok. Disparitas ideologi yang sangat berseberangan—terlepas dari agama mereka yang sama—antara YPJ dan IS menghadirkan situasi yang hostile ketika salah satunya mengartikulasikan tindakan ofensif yang mengekspresikan ideologi yang diyakininya. Perbedaan ideologi antara YPJ dan IS ini pun berkontribusi terhadap pertanyaan baru mengenai sistem komunitas yang melampaui negara-bangsa, yakni YPJ dengan menitikberatkan pada ketiadaan bentuk negara dan pendekatan perempuan-sentris serta IS dengan bentuk *pseudo-state*.

Ketiga tulisan di atas menjadi referensi bagi penulis untuk menyusun penelitian ini. Ulasan pertama tulisan di atas membahas demokrasi radikal Rojava dalam kacamata *Multitude* serta tantangan dan kemungkinan model demokrasi konfederalisme sebagai alternatif model negara-bangsa (*nation-state*). Ulasan tulisan kedua membahas peluang dan tantangan Rojava beserta kaitannya dengan strategi PYD sebagai penggerak utamanya. Terakhir, Ulasan ketiga tulisan di atas

berfokus membahas unit militer perempuan Rojava (YPJ) dalam analisis interseksionalitas (gender, etnis, bangsa, dan kelas) beserta kontestasi ideologi demokrasi konfederalisme dengan ideologi IS. Ketiga tulisan tersebut berfokus kepada eksistensi Rojava beserta keberlangsungannya pasca konflik terjadi, namun tidak menjelaskan proses historis bagaimana kontradiksi bisa berujung pada terbentuknya struktur konflik. Model alternatif seperti Rojava tidak hadir semerta-merta karena momentum yang dihadirkan oleh konflik Suriah, melainkan proses akumulasi konflik, kekerasan, dan pengorganisasian yang telah berlangsung sejak berdekade. Pemahaman terhadap proses historis ini dapat memberikan kontribusi untuk memahami kontradiksi dalam dimensi ideologis, kapasitas material, dan sarana hegemoni rezim.